

**KEWENANGAN OTORITAS JASA KEUANGAN TERKAIT
PERMOHONAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN
UTANG PERUSAHAAN ASURANSI**

TESIS

Oleh:

**SYLVIA ANITA LALAMENTIK
2102190122**



**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
JAKARTA
2023**

**KEWENANGAN OTORITAS JASA KEUANGAN TERKAIT
PERMOHONAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN
UTANG PERUSAHAAN ASURANSI**

TESIS

Diajukan untuk memenuhi persyaratan akademik guna memperoleh gelar Magister Hukum
(M. H.) Pada Program Studi Magister Hukum Program Pascasarjana
Universitas Kristen Indonesia

Oleh:

**SYLVIA ANITA LALAMENTIK
2102190122**



**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
JAKARTA
2023**



UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA PROGRAM PASCASARJANA

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TUGAS AKHIR

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

dengan; Nama : Sylvia Anita Lalamentik

NIM : 2102190122

Program Studi : Magister Hukum

Fakultas : Program Pascasarjana

Dengan ini menyatakan bahwa karya tulis tugas akhir yang berjudul “

Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan Terkait Permohonan Penundaan

Kewajiban Utang Perusahaan Asuransi” adalah:

1. Dibuat dan diselesaikan sendiri dengan menggunakan hasil kuliah, tinjauan lapangan, buku-buku dan jurnal acuan yang tertera di dalam referensi pada karya tugas akhir saya.
2. Bukan merupakan duplikasi karya tulis yang sudah dipublikasikan atau yang pernah dipakai untuk mendapatkan gelar sarjana di Universitas lain, kecuali pada bagian-bagian sumber informasi yang dicantumkan dengan cara referensi yang semestinya.
3. Bukan merupakan karya terjemahan dari kumpulan buku atau jurnal acuan yang tertera di dalam referensi pada tugas.

Kalau terbukti saya tidak memenuhi apa yang dinyatakan di atas, maka karya tugas akhir ini dianggap batal.

Jakarta, 10 November 2023



Sylvia Anita Lalamentik



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
PROGRAM PASCASARJANA**

HALAMAN PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING

**“ Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan Terkait Permohonan
Penundaan kewajiban Utang Perusahaan Auransi “**

Oleh :

Nama : Sylvia Anita Lalamentik
NIM : 2102190122
Program Studi : Magister Hukum
Peminatan : Hukum Bisnis

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dan dipertahankan dalam sidang Tugas Akhir guna mencapai gelar Magister Hukum pada Program Studi Magister Hukum, Program Pascasarjana Universitas Kristen Indonesia.

Jakarta, 10 November 2023
Menyetujui,

Pembimbing I

Dr. Hulman Panjaitan, SH, MH.
NIP/NIDN: 971434/0020096802

Pembimbing II

Dr. Gindo L Tobing, S.H., M.H.
NIDK: 9903260066

Ketua Program Studi Magister Hukum

Dr. Wiwik Sri Widiarty, S.H., M.H.
NIP/NIDN: 141104/ 0327096504

Direktur Program Pascasarjana

Prof. Dr. dr. Bernadetha Nadeak, M. Pd., PA.
NIP/NIDN: 001473/0320116402






**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
PROGRAM PASCASARJANA**

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Pada tanggal 10 November 2023 telah diselenggarakan Sidang Tesis untuk memenuhi sebagian persyaratan akademik guna memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Studi Magister Hukum Program Pascasarjana, Universitas Kristen Indonesia, atas nama:

Nama : Sylvia Anita Lalamentik
NIM : 2102190122
Program Studi : Magister Hukum
Fakultas : Program Pascasarjana

Termasuk ujian Tugas Akhir yang berjudul **“Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan Terkait Permohonan Penundaan Kewajiban Utang Perusahaan Asuransi”** oleh tim penguji yang terdiri dari::

Nama Penguji	Jabatan dalam Tim Penguji	Tanda Tangan
1. Dr. Hulman Panjaitan, S.H., M.H.	Sebagai Ketua	
2. Dr. Gindo L Tobing, S.H., M.H.	Sebagai Anggota	 <hr/>
3. Dr. Hendri Jayadi, S.H., M.H.	Sebagai Anggota	



UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA PROGRAM PASCASARJANA

Pernyataan dan Persetujuan Publikasi Tugas Akhir

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sylvia Anita Lalamentik
NIM : 21021901422
Program Studi : Magister Hukum
Fakultas : Program Pascasarjana
Jenis Tugas Akhir : Tesis
Judul : Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan Terkait Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Perusahaan Asuransi

Menyatakan bahwa:

1. Tugas akhir tersebut adalah benar karya saya dengan arahan dari dosen pembimbing dan bukan merupakan duplikasi karya tulis yang sudah dipublikasikan atau yang pernah dipakai untuk mendapatkan gelar akademik di perguruan tinggi manapun;
2. Tugas akhir tersebut bukan merupakan plagiat dari hasil karya pihak lain, dan apabila saya/kami mengutip dari karya orang lain maka akan dicantumkan sebagai referensi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Saya memberikan Hak Non Eksklusif Tanpa Royalti kepada Universitas Kristen Indonesia yang berhak menyimpan, mengalih media/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilih hak cipta.

Apabila di kemudian hari ditemukan pelanggaran Hak Cipta dan Kekayaan Intelektual atau Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia lainnya dan integritas akademik dalam karya saya tersebut, maka saya bersedia menanggung secara pribadi segala bentuk tuntutan hukum dan sanksi akademis yang timbul serta membebaskan Universitas Kristen Indonesia dari segala tuntutan hukum yang berlaku.

Dibuat di Jakarta, 10 November 2023



Sylvia Anita Lalamentik

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini, yang merupakan salah satu syarat dalam menempuh ujian akhir guna memperoleh gelar Magister Hukum pada program Pascasarjana Universitas Kristen Indonesia, bahan penyusunan Tesis ini berdasarkan hasil penelitian dan kajian pustaka yang berkaitan dengan obyek yang diteliti oleh penulis yaitu tentang **“KEWENANGAN OTORITAS JASA KEUANGAN TERKAIT PERMOHONAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG PERUSAHAAN ASURANSI”**.

Peneliti menyadari bahwa tanpa izin dari Tuhan serta bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak terutama keluarga dan pihak lainnya maka tentunya peneliti akan menemukan kesulitan dalam menyelesaikan tesis ini, pada kesempatan ini, peneliti mengucapkan terimakasih secara khusus kepada Tuhan yang telah memberikan rahmatNya dalam menyelesaikan tesis ini serta semua pihak yang telah memberikan dukungan moril maupun materil kepada peneliti diantaranya kepada :

1. Bapak Edward Sirait, S.E., Ketua Yayasan Universitas Kristen Indonesia. yang telah memberikan kesempatan kepada penulis menjadi Keluarga Besar Civitas Akademik Universitas Kristen Indonesia.
2. Bapak Dr. Dhaniswara K Harjono, S.H., M.H., M.BA., Rektor Universitas Kristen Indonesia, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis menjadi Keluarga Besar Civitas Akademik Universitas Kristen Indonesia.
3. Ibu Prof. Dr. dr. Bernadetha Nadeak, M.Pd., PA, Direktur Program Pascasarjana Universitas Kristen Indonesia, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengikuti pendidikan pada Program Pascasarjana Universitas Kristen Indonesia.
4. Ibu Dr. Wiwik Sri Widiarty, S.H., M.H. selaku Ketua program studi magister Ilmu hukum Universitas Kristen Indonesia
5. Bapak Dr. Hulman Panjaitan, S.H., M.H., selaku Dosen pembimbing 1
6. Bapak Dr. Gindo L Tobing, S.H., M.H., selaku Dosen pembimbing 2

7. Para Dosen Pengajar pada Program Studi Magister Hukum Universitas Kristen Indonesia
8. Suami tercinta Capt. Elfried Andrie Wenur, M.Mar, M.H. dan anak-anak tercinta Grace Mathilda Theresia Wenur, S.E., dan Aksel Stefan Wenur yang selalu memberikan dukungan semangat selama menempuh perkuliahan Magister Hukum.
9. Rekan-rekan kelas Perhubungan Laut Magister Hukum UKI Tahun Akademik 2021/2022.
10. Pihak pihak yang tidak bisa di sebutkan satu persatu yang telah membantu peneliti dalam penulisan tesis ini.

Pada akhirnya peneliti berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang membantu selama masa perkuliahan dan penyusunan tesis dan peneliti berharap agar semoga Tesis ini dapat bermanfaat bagi perkembangan Ilmu hukum di Indonesia.

Jakarta, 10 November 2023
Penulis,

Sylvia Anita Lalamentik

DAFTAR ISI

	Halaman
PERNYATAAN ORISINALITAS	ii
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
PERSETUJUAN PENGUJI.....	iv
PUBLIKASI.....	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	viii
ABSTRAK.....	x
ABSTRACT	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Kegunaan Penelitian	8
E. Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual	9
1. Kerangka Teori	9
2. Kerangka Konseptual	14
F. Metode Penelitian	16
1. Spesifikasi Penelitian.....	17
2. Pendekatan Penelitian.....	19
3. Jenis dan Sumber Data.....	20
4. Teknik Pengumpulan Data	22
5. Teknik Analisis Data	23
G. Orisinalitas Penelitian	24
H. Sistematika Penulisan	27
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	29
A. Tinjauan Perusahaan Asuransi.....	29
1. Pengertian Asuransi	29
2. Sejarah Asuransi	32
3. Prinsip-prinsip Asuransi	35
4. Penggolongan Asuransi	38
5. Lembaga Asuransi	42
6. Pihak-Pihak dalam Asuransi	47
B. Tinjauan Tentang Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)	54
1. Pengertian PKPU	54
2. Tahap-tahap PKPU.	57
3. Pihak-pihak dalam PKPU.	59
4. Tujuan Pengajuan PKPU	64
C. Otoritas Jasa Keuangan	69
1. Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan	69
2. Fungsi, Tugas dan Wewenang Otoritas Jasa Keuangan....	72
BAB III ANALISIS DAN PEMBAHASAN KEBIJAKAN PERMOHONAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG PERUSAHAAN ASURANSI	76
A. Kasus Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Perusahaan Asuransi	76

1. Kasus Posisi	76
2. Tuntutan	83
3. Putusan Hakim	86
B. Akibat Hukum dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.....	89
C. Kebijakan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Perusahaan Asuransi	96
BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN KEWENANGAN OTORITAS JASA KEUANGAN TERHADAP PERMOHONAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG PERUSAHAAN ASURANSI	114
A. Prosedur Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang	114
B. Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Perusahaan Asuransi oleh Otoritas Jasa keuangan (OJK).....	120
C. Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan Terkait Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Perusahaan Asuransi.	125
BAB V PENUTUP.....	149
A. Kesimpulan	149
B. Saran.....	150
DAFTAR PUSTAKA.....	152



ABSTRAK

Judul : **KEWENANGAN OTORITAS JASA KEUANGAN TERKAIT PERMOHONAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG PERUSAHAAN ASURANSI**

Pasal 2 ayat (5) UU Kepailitan dan PKPU yang menyebutkan kewenangan OJK sebagai pihak yang berhak untuk mengajukan permohonan pailit dan PKPU pada perusahaan asuransi. Dalam prakteknya permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang perusahaan asuransi PT Asuransi Kresna yang diajukan oleh kreditor tanpa melalui OJK, dikabulkan oleh Majelis Hakim. Putusan PKPU Kresna tersebut seolah menjadi preseden baru bahwa permohonan PKPU terhadap perusahaan asuransi yang diajukan oleh kreditor tanpa melalui OJK ternyata bisa dikabulkan. Adapaun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana kebijakan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang perusahaan asuransi? Serta bagaimana kewenangan Otoritas Jasa Keuangan terhadap permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang perusahaan asuransi? Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori kewenangan menurut Philipus M. Hadjon dan teori kepastian hukum menurut Jan Michael Otto.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang dilakukan sebagai upaya untuk mendapatkan data yang diperlukan sehubungan dengan permasalahan. Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Untuk analisis data dilakukan dengan metode analisis kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang perusahaan asuransi yaitu sebagaimana ketentuan Pasal 223 Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang bersifat imperatif dalam pengajuan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang terhadap perusahaan asuransi. Dimana kreditor selaku nasabah dari perusahaan asuransi harus terlebih dahulu menyampaikan permohonan kepada Otoritas Jasa Keuangan. Apabila permohonan disetujui, maka Otoritas Jasa Keuangan mewakili kreditor untuk mengajukan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang kepada Pengadilan Niaga. Namun apabila Otoritas Jasa Keuangan menolak permohonan tersebut, maka penolakan permohonan tersebut disampaikan secara tertulis disertai alasannya. Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan terhadap permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang perusahaan asuransi yaitu hanya menyangkut kedudukan hukum, dimana Otoritas Jasa Keuangan hanya bertindak sebagai pemohon dalam perkara penundaan kewajiban pembayaran utang berdasarkan surat kuasa khusus sebagai wakil dari para kreditor selaku nasabah perusahaan asuransi. Sehingga dapat dikatakan bahwa kreditor atau nasabah pemegang polis asuransi tidak memiliki kedudukan hukum dalam mengajukan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang terhadap perusahaan asuransi ke Pengadilan Niaga. Melainkan Kreditor dapat mengajukan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang terhadap perusahaan asuransi melalui Otoritas Jasa Keuangan selaku lembaga Pembina dan pengawas disektor keuangan.

Kata Kunci : **Kewenangan, Otoritas Jasa Keuangan, Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Perusahaan Asuransi**

ABSTRACT

Title: AUTHORITY OF THE FINANCIAL SERVICES AUTHORITY REGARDING THE APPLICATION FOR POSTPONEMENT OF DEBT PAYMENT OBLIGATIONS OF INSURANCE COMPANIES

Article 2 Paragraph (5) of the law on compensation and PKPU which states the authority of the FSA as a party entitled to file a bankruptcy application and PKPU on insurance companies. In practice, the application for postponement of the debt payment obligations of the insurance company PT Asuransi Kresna filed by creditors without going through the OJK, was granted by the panel of judges. The decision of PKPU Kresna seems to be a new precedent that PKPU applications against insurance companies submitted by creditors without going through the OJK can be granted. Adapun formulation of the problem in this study is how the policy application delay debt repayment obligations of insurance companies? And how is the authority of the Financial Services Authority on the application for postponement of debt payment obligations of insurance companies? The theory used in this study is the theory of authority according to Philipus M. Hadjon and the theory of legal certainty according to Jan Michael Otto.

The method used in this study is normative legal research conducted in an effort to obtain the necessary data in connection with the problem. The Data used is secondary data consisting of primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. For data analysis is done by qualitative analysis method.

The results showed that the policy of application for postponement of debt payment obligations of insurance companies is as the provisions of Article 223 of the bankruptcy law and the postponement of debt payment obligations that are imperative in filing an application for postponement of debt payment obligations to insurance companies. Where creditors as customers of insurance companies must first submit an application to the Financial Services Authority. If the application is approved, the Financial Services Authority represents the creditor to apply for a delay in debt repayment obligations to the Commercial Court. However, if the Financial Services Authority rejects the application, the rejection of the application is submitted in writing along with the reason. The authority of the Financial Services Authority on the application for postponement of debt repayment obligations of insurance companies is only concerned with legal status, where the Financial Services Authority only acts as an applicant in the case of postponement of debt repayment obligations based on a special power of attorney as a representative of creditors as an insurance company customer. So it can be said that the creditor or customer of the insurance policy holder does not have a legal position in applying for a delay in debt payment obligations against the insurance company to the Commercial Court. Instead, creditors can apply for a delay in debt payment obligations to insurance companies through the Financial Services Authority as a supervisory institution in the financial sector.

Keywords : Authority, Financial Services Authority, Postponement Of Debt Repayment Obligations, Insurance Companies